

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaruh agama terhadap akuntansi bukanlah suatu masalah yang telah di eksplorasi oleh para peneliti, selama ini para peneliti lebih menyukai mengeksplorasi akuntansi murni. Agama memiliki peran yang sentral dalam membentuk dan menegakkan perilaku etis seperti kejujuran, keadilan serta keterbukaan dalam konteks pengelolaan akuntansi maupun hal lainnya.<sup>1</sup> Peran akuntansi dalam organisasi keagamaan juga masih belum terlalu di minati, padahal organisasi keagamaan juga membutuhkan peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan demi terciptanya organisasi yang memiliki integritas yang baik di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kismawadi yang meneliti di salah satu organisasi keagamaan menemukan praktik akuntansi sudah dilakukan sesuai dengan standar yang di atur dan secara transparan,<sup>2</sup> namun pada penelitian Goddard And Mussa Juma Assad juga sudah pernah melakukan penelitian pada lembaga NGO dan menemukan bahwa banyak terjadi kelamahan pada fungsi akuntansi, laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan secara utuh kegiatan organisasi serta tidak digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan.<sup>3</sup> Sedangkan hal ini lebih di dukung oleh penelitian Kovach yang juga melakukan penelitian di NGO menemukan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak transparan serta tidak semua NGO membuat laporan tahunannya.<sup>4</sup>

Konsep ekonomi islam dalam mengelola organisasi ada yang disebut dengan *islamic corporate governance*, Menurut Bhatti mengartikan bahwa *islamic corporate governance* (ICG) adalah berusaha merancang cara dimana agen ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan kepada

---

<sup>1</sup> Ullly Artha. *Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Corporate Social Responsibility Di Indonesia.* Law Reform Vol 7, No 2. 2012. h. 121

<sup>2</sup> Early, *Accountability And Innovative Financial Reporting To The Mosque*, The International Journal Of Organizational Innovation, Vol 10 No 4 2018. h 101

<sup>3</sup> Andrew Goddard And Mussa Juma Assad. *Accounting And Navigating Legitimacy In Ngo's.* Fourth Asia Pasicif Interdisciplinary Reaserach In Accounting. 2004. h.4

<sup>4</sup> Hetty Kovach. *Power Without Accountability?* The Global Accountability Report I, One World Trust London. 2003 h.21

nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah.<sup>5</sup> Teori yang mendukung *Islamic Corporate Governance* dikenal dengan *Theory Agency* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, dimana teori tersebut memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.<sup>6</sup> Dengan demikian dalam teori *Agency* terjadilah tarik menarik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen, dimana pihak manajemen dapat melakukan pekerjaan berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan demikian diduga pihak manajemen dapat melakukan kecurangan atau manipulasi yang semua bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan ujungnya akan dapat merugikan perusahaan. Hal ini yang harus di contoh oleh organisasi keagamaan agar menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat secara umum dalam mengelola dana yang bersumber dari donasi masyarakat. Implementasi *Islamic Corporate Governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko baik resiko *financial* maupun reputasi.

Organisasi lembaga Dayah merupakan penyokong utama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam membangun bangsa, lembaga pondok pesantren juga mengelola keuangan yang berasal dari berbagai sumber yang harus di pertanggung jawabkan dengan praktik akuntabilitas yang baik. Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh No 9 tahun 2018 Sumber pendanaan pesantren berasal dari berbagai sumber, termasuk mengelola dana yang berasal dari pemerintah yang berjumlah Ratusan Milyar (APBA) atau minimal 30% dari APBA, namun buktinya Dayah- Dayah masih memprihatinkan, kondisi fisik Dayah serta SDM yang tidak diberikan upah/ gaji hanya bekerja sebagai bentuk bakti kepada Dayah.<sup>7</sup>

Sumber pendapatan organisasi keagamaan masih ada yang berasal dari kegiatan meminta-minta sumbangan baik di cafe-cafe maupun di jalanan, bahkan meletakkan kotak uang di tengah jalan yang bisa menghambat/ mencelakai

---

<sup>5</sup> Bhatti. *Causes of Stress in Organization, a Case Study of sukkur*. International Journal of Business and Management, 5 (11) 2010, h 5

<sup>6</sup> Michael C Jensen. *Organization Theori And Methodology*. The Accounting Review Vol 1, No 2. April 1983: h 319

<sup>7</sup> Hasil wawancara kepada staf di Dayah kota langsa, pada tanggal 1 Mei 2020.

pengguna jalan, ini bertentangan dengan perbuatan nabi yang bahkan menyingkirkan duri dari jalanan agar pengguna tidak terganggu.<sup>8</sup> Hal tersebut setidaknya bisa mencoreng nama baik organisasi, apalagi menyangkut dengan organisasi agama yang sangat sakral dengan perbuatan yang baik.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Walker Secara umum, akuntabilitas menunjukkan hubungan antara keduanya pihak di mana satu pihak (individu, kelompok, perusahaan, pemerintah, organisasi, dan lain-lain. secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada pihak lain atas sesuatu, apakah itu sebuah tindakan, proses, output, atau hasil.<sup>9</sup> melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.<sup>10</sup> Hal ini di butuhkan sebagai bahan evaluasi yang akan dilakukan setiap tahun tentang perkembangan organisasi.

Akuntabilitas diharuskan sebagai bentuk bertanggung jawabnya pengelola kepada semua pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar organisasi. Selain itu selama ini organisasi keagamaan menjadi salah satu objek penelitian yang termarginalkan,<sup>11</sup> padahal pondok pesantren juga berpotensi menjadi salah satu institusi yang sangat berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah, dalam hal ini ada tiga hal yang sangat bisa dilakukan oleh pondok pesantren yaitu sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syariah, pesantren sebagai laboratorium bisnis syariah, dan pesantren sebagai pusat belajar ekonomi syariah.<sup>12</sup> Hal ini salah satu potensi yang sangat bisa di kembangkan demi terciptanya ekonomi islam yang baik dan kuat di indonesia.

Berdasarkan hasil penelitiani Irvan dalam mencegah kecurangan atau *fraud* pondok pesantren gontor menerapkan sistem manajemen terbuka (*open*

---

<sup>8</sup> Umar Sulaiman dan Abdullah Al-Asyqar, *Shahih Qashashin Nabawi, atau Ensiklopedia Kisah Shahih Sepanjang Masa*, terj. Izzudin Karimi, Lc. Pustaka Yassir, 2008. h. 316

<sup>9</sup> Walker Peter, *Understanding Accountability: Theoretical Models and Their Implications for Social Service Organizations*. Social Policy and Administration, No 36 Vol 1, 2002 h. 62

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta*, Andi, 2008. 132

<sup>11</sup> Kismawadi. *Accountability And Innovative Financial Reporting To The Mosque*. International Journal Of Organizational Innovation. Vol 10 No 4. 2018 h. 102

<sup>12</sup> Marlina. *Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12 No 1 Juni 2014. h.117

*management*) yakni seluruh santri dan penghuni pesantren mengetahui seluruh proses ekonomi yang ada di pondok pesantren dan laporan keuangan di pertanggung jawabkan di depan hadapan seluruh penghuni pesantren.<sup>13</sup>

Sistem ini sangat di butuhkan agar seluruh penghuni pondok pesantren tidak merasakan kecurigaan yang berlebihan terhadap pengelola. Namun penelitian yang dilakukan Dixon, Melakukan penelitian menyangkut akuntabilitas dana bergulir yang dilakukan sebuah organisasi social NGO CETZAM, untuk membantu kaum miskin yang ada di Zimbabwe, dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak pekerja di organisasi tersebut yang melakukan kecurangan dengan cara memalsukan data dengan membuat bukti fiktif dalam penyaluran dana sosial untuk masyarakat di Zimbabwe.<sup>14</sup> Sebuah artikel yang ditulis oleh Siino memberikan contoh lain dari penyalahgunaan dana timbul dari kurangnya kontrol dan kurangnya praktik akuntabilitas, termasuk apa yang terjadi di keuskupan agung San Francisco, yang mengajukan gugatan terhadap pendeta yang dipecat karena menggelapkan lebih dari \$ 250.000 untuk membiayai liburannya. Dalam kasus lain, seorang pendeta Pittsburgh mengaku mencuri \$ 1,35 juta dalam donasi lebih dari 26 tahun dari dua gereja yang telah dikelolanya.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Goddart menemukan bahwa kelemahan fungsi akuntansi dalam NGO disebut dengan fenomena mekanisme regulator yang berarti bahwa akuntansi sebagai mekanisme pelaporan hanya digunakan dan diberikan hanya sebatas kepada para donatur yang berparan tidak untuk masyarakat luas, dan laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan secara utuh kegiatan organisasi dan tidak digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak organisasi.<sup>16</sup> Regulasi yang jelas dan peranan penting dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah sangat di butuhkan dalam praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh organisasi keagamaan.

---

<sup>13</sup> Irvan. *Pencegahan Kecurangan (Fraud) Di Pondok Pesantren Modern Gontor*. Conference On Islamic Management Accounting And Economics. Volume 1, 2018, h. 40

<sup>14</sup> Dixon And Jhon Ritche, *Microfinance: Accountability From The Grasroots Accounting, Auditing And Accountability Journal* Vol 9 No 13, 2006, h. 406

<sup>15</sup> Siino Rosanne. *Playing Loose with God's Money*. Stanford Social Innovation Review, 2(1), 2004. h.14

<sup>16</sup> Goddart And Mussa Juma Assad. *Accounting And Navigating Legitimacy In Tanzanian NGO*. Accounting And Accountability Journal. Vol 19 No 3. 2006. h. 3

Di Aceh adalah satu-satunya Provinsi yang memiliki perwakilan pemerintah yang spesial mengurus Dayah, yakni dinas Dayah yang khusus untuk mewartakan Dayah-Dayah yang di harapkan bisa mengembangkan kualitas Dayah yang ada saat ini bukan hanya kualitas pembelajaran tetapi juga di harapkan mampu membuat pengelolaan administrasi yang lebih baik. Berikut program yang telah di jalankan oleh dinas pendidikan Dayah Aceh.

**Tabel 1. Program Pembinaan Manajemen Dayah 2012 - 2016**

Pelatihan kelembagaan manajemen administrasi dan tata kelola Dayah
Pelatihan manajemen kelembagaan Dayah
Pelatihan pembinaan dan kecerdasan pengelolaan Dayah
Pelatihan manajemen produktif dan asset Dayah
Pelatihan pembinaan manajemen keuangan dan asset Dayah
Pelatihan pembinaan manajemen sistem informasi Dayah
Bimtek penyelenggaraan kegiatan dan realisasi keuangan

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat program-program yang telah dijalankan oleh dinas pendidikan Dayah dalam upaya meningkatkan manajemen sumber daya manajemen yang ada di dalam organisasi keagamaan Dayah, berikut adalah nilai anggaran yang di anggarkan oleh dinas pendidikan Dayah dari tahun ke tahun:

**Tabel 2. Anggaran Program Pembinaan Manajemen Dayah Dinas Pendidikan Dayah**

Tahun	Jumlah Anggaran
2018	11.985.000.000
2019	13.183.500.000
2020	14.501.035.000
2021	15.952.035.000
2022	17.547.238.500

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh No 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan Dayah di jelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan Dayah pasal 20, bahwa dalam pengelolaanya harus bersifat adil, efisien, transparan, akuntabel

dan partisipatif. Dinas pendidikan Dayah Aceh memiliki tupoksi untuk membina Dayah-Dayah yang terdapat di seluruh Aceh yang mencapai 23 kabupaten kota.

Berikut tabel total jumlah lembaga penyelenggaraan pendidikan:<sup>17</sup>

**Tabel 3. Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan di Aceh**

<b>Lembaga Penyelenggara Pendidikan</b>	<b>Jumlah Lembaga</b>	<b>Jumlah Santri</b>	<b>Jumlah Guru</b>
Taman pendidikan Qur'an	4823	263.657	27.440
Diniyah Takmiliah	382	2044	2259
Pp penyelenggara wajar dikdas 9 tahun	23	0	144
Pondok pesantren salafiyah	879	0	234

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2017

Berdasarkan sumber website rri.co.id yang mewawancarai kepala dinas Dayah provinsi Aceh saat ini memiliki 1.127 pondok pesantren atau Dayah dan memiliki santri lebih dari 120 ribu orang.<sup>18</sup> Namun masih banyak Dayah-Dayah yang di dirikan belum memiliki landasan hukum yang jelas, didirikan secara ilegal,<sup>19</sup> oleh sebab itu Dinas pendidikan Dayah Aceh memiliki tupoksi meningkatkan mutu tenaga pendidik Dayah, meningkatkan mutu pendidikan santri, meningkatkan mutu kelembagaan Dayah dan meningkatkan mutu manajemen penyelenggaraan Dayah.<sup>20</sup>

Pada Prinsipnya operasional pondok pesantren atau Dayah mengalami berbagai problematika mulai dari kepemimpinan Dayah, santri, tenaga pendidik, kurikulum, keuangan sarana dan prasarana hingga pada sampai kelulusan santrinya.<sup>21</sup> Pada dasarnya kurangnya perhatian pada aspek administrasi, termasuk juga dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada pelaporan keuangan tercermin dari laporan keuangan yang di buat hanya sederhana 'sekedarnya', mamun

<sup>17</sup> Kementerian Agama Data Jumlah Pontren, Kemenag.Go.Id 2017

<sup>18</sup> Usamah, Jumlah Dayah Di Aceh 1.127 Unit, Tampung 120 Ribu Santri, 29 Februari 2019. [Http://Rri.Co.Id](http://Rri.Co.Id). Di akses 13/12/2019

<sup>19</sup> Nuoline. RMI PBNU Serahkan Bantuan 200 Legalitas Badan Hukum Pesantren, 2019. <https://www.nu.or.id>. di akses tanggal 26/10/2019

<sup>20</sup> SK Penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah Aceh

<sup>21</sup> Almuhajir. *Politik Penyetaraan Dayah Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol 14 No 2. 2015. h.235



penelitian ini di bantah oleh kismawadi yang menemukan bahwa ada organisasi yang pengelolaannya di lakukan oleh profesional.<sup>22</sup>

Banyak yang beranggapan bawah Pengelolaan keuangan pada organisasi keagamaan di anggap tidak akan mungkin menyalahgunakan amanah yang di berikan karena mereka memiliki latar belakang agama yang baik<sup>23</sup>, namun faktanya LSM Gerak menduga adanya kecurangan dalam penyaluran dana bansos yang di peruntukan untuk Dayah yang ada di aceh yang dilakukan oleh dinas Dayah yang mayoritas pengurusnya adalah alumni dari Dayah yang ada di Aceh.<sup>24</sup>

Dinas Dayah Aceh tahun 2019 menganggarkan dana untuk pendidikan Dayah mencapai lima ratus milyar lebih (APBA), hal ini membutuhkan pengelolaan dan tanggung jawab yang baik yang akan di pertanggung jawabkan kepada seluruh stekholder.<sup>25</sup> Namun selain dana dari pemerintah terjadi fenomena yang unik di kalangan masyarakat Aceh, hasil observasi awal banyak yang mempertanyakan sumber pendanaan pengelolaan pondok pesantren, karena fenomena yang terjadi adalah banyaknya pengemis yang berkeliaran di masyarakat mengatasnamakan organisasi keagamaan baik Dayah maupun masjid. Hal ini mencoreng nama baik lembaga daya di mata masyarakat yang selama ini dipandang selalu mengajarkan kebaikan sesuai dengan syariat.

Akuntabilitas telah digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab mereka yang mengelola atau mengendalikan sumber daya untuk orang lain<sup>26</sup>. Bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah manajemen dalam mengelola organisasinya demi tercapai tujuan dan sasaran yang di harapkan, melalui media akuntabilitas ini di harapkan pengelola bersungguh sungguh dalam mengelola organisasinya karena akan di pertanggung jawabkan dalam bentuk sebuah laporan yang akan di laporkan secara periodic Islam juga telah mengharuskan

---

<sup>22</sup> Kiswamawadi, *Accountability And Innovative Financial Reporting To The Mosque*. The Internasional Journal Of Organizational Innovation. Vol 10 No 4, April 2018. h.101

<sup>23</sup> Sonhaji. *Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Syariah Untuk Organisasi Islam*. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol 8 No 1. 2017. h.47

<sup>24</sup> GeRAK, *Ungkap Dugaan Pungli Dana Hibah Pesantren oleh Oknum Pejabat Dinas Dayah, Ini Totalnya*. <https://aceh.tribunnews.com> diakses pada 23/10/2019

<sup>25</sup> Rencana Kerja 2019 Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. [dpd.acehprov.go.id](http://dpd.acehprov.go.id)

<sup>26</sup> Hasan Basri Afiduddin. *Towards Good Accountability: The Role Of Accounting In Islamic Religious Organisations*. International Journal Of Humanities And Social Sciences. Vol 4 No 5. 2010. h.1141

akuntabilitas sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

‘‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya’’ (QS. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat di simpulkan bahwa pencatatan dari setiap aktivitas transaksi juga akan memberikan informasi yang baik sesuai keadaan *rill* demi terciptanya akuntabilitas yang di butuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Semua itu dilakukan sebagaiantisipasi jika terjadi hal- hal yang tidak di inginkan dari eksternal organisasi serta sebagai bukti bahwa pengelola sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Pada pernyataan standar akuntansi keuangan No 45 atau biasa di sebut PSAK 44 tahun 2011, telah di atur tentang pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba, Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik demi suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Penelitian yang dilakukan Oleh adebayo menyebutkan bahwa apapun bentuk lembaga baik swasta, pemerintah ataupun nirlaba juga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan berkesinambungan agar aktifitas organisasi yang berjalan akan baik.<sup>27</sup> *Trueblood Committee* yang dibentuk oleh Institut Akuntan Publik Amerika (AICPA) pada tahun 1972, menerangkan bahwa akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan bukan sebatas media untuk mengambil keputusan, namun sebagai bentuk akuntabilitas yang di berikan oleh

---

<sup>27</sup> Adebayo. "Relationship Between Corporate Governance And Organizational Performance: Nigerian Listed Organizations Experience." International Journal Of Business And Management Invention Vol 2 No 2. 2013. h.6



pengelola organisasi kepada pihak yang berkepentingan di dalamnya agar terciptanya kepercayaan public terhadap lembaga tersebut<sup>28</sup>.

Akuntansi di pesantren menjadi sangat penting sebagai alat bantu dalam akuntabilitas yang dapat di mengerti oleh seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya karena mengelola dana dari masyarakat luas dan harus di pertanggung jawabkan agar masyarakat akan terus percaya dana yang telah di amanahkan dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan laporan yang baik maka membuat para donatur akan dengan mudah mempercayakan dananya untuk dipergunakan organisasi demi kemaslahatan ummat. Beberapa tahun belakangan ini perhatian dan usaha untuk mengungkap keterkaitan antara akuntabilitas dengan agama sudah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh yasmin menemukan bahwa sebenarnya akuntabilitas sangat di butuhkan oleh LSM untuk mengurangi masalah yang akan timbul dengan tidak terduga dari lingkungan eksternal organisasi LSM.

Peran pemimpin organisasi sangat dibutuhkan dalam praktik akuntabilitas, mereka tidak harus khawatir mempublikasikan kegiatan mereka kepada masyarakat dan akan bisa meningkatkan citra baiknya di masyarakat, serta akuntabilitas bisa meningkatkan citra baik organisasi.<sup>29</sup> Penelitian di organisasi agama islam telah dilakukan oleh Kerry<sup>30</sup> penelitian tersebut meneliti tentang akuntabilitas dengan menggunakan metode studi kasus yang di lakukan di gereja-gereja yang berada di inggris. Hasil yang ditemukan bahwa perlakuan akuntansi di gereja inggris dapat menjadi bagian dari praktik spritualitas serta sakral. Dalam kasus lain Faktanya ditemukan bahwa masih banyaknya organisasi keagamaan yang pengelolanya dilakukan oleh pemuka agamanya sendiri yang tidak memiliki dasar dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan sekedarnya saja.<sup>31</sup> Goffman, 1959 manusia adalah aktor yang berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain, teori ini

---

<sup>28</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Peran Akuntansi Islam Dalam Mendorong Implementasi*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol 3 No 2. 2001. h.416

<sup>29</sup> Sofia Yasmin and Ghafran. *Exploring de-facto accountability regimes in Muslim NGOs*. 2018. h.2

<sup>30</sup> Kerry Jacobs. *The Sacred And The Secular:Examining The Role Of Accounting In The Religious Context*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 18 Iss 2. 2005. h.190

<sup>31</sup> Dahnil anzar Simanjuntak. and Januarsi . *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan DI pesantren*. Simposiun Nasional Akuntansi. 2011. h.29

melihat manusia sebagai individu dan masyarakat. Dalam teori ini manusia berbeda dengan binatang karena mempunyai kemampuan berpikir, bisa mempelajari dan mengubah makna dan symbol, melakukan tindakan dan berinteraksi<sup>32</sup>.

Setiap manusia wajib bertanggung jawab terhadap apa yang telah di amanahkan kepadanya sesuai dengan moralitas agama islam, islam telah menegaskan terhadap umatnya bahwa apa yang ia miliki bukanlah miliknya karena semua hanyalah titipan sang pencipta Allah SWT. Kerena demikian setiap manusis memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri, alam sekitar dan kepada sang pencipta, semua ini tercermin di dalam Alquran surat Al muddatstsir (74) 38 yang artinya “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di buatnya. Jadi setiap apa yang telah dilakukannya di dunia ini akan di pertanggung jawabkan nantinya setelah kita meninggal. Tetapi praktek akuntansi di luar entitas bisnis khususnya organisasi keagamaan sangat lah terabaikan<sup>33</sup>, Sebagai organisasi yang mengelola dana sumbangan dari masyarakat umum, organisasi keagamaan seperti pesantren sudah seharusnya mengelola dana yang masuk dan melaporkan nya secara rinci agar bisa di pertanggung jawabkan dalam penggunaan dana yang sudah di amanahkan oleh para penyumbang kepada pengurus organisasi keagamaan tersebut agar tidak terjadinya fitnah. Fenomena yang terjadi salah satu pemasukan pondok pesantren adalah dengan adanya pengemis yang meminta sumbangan dengan atas nama pengurus pondok pesantren maupun pesantren, padahal ini adalah salah satu bentuk yang kurang baik untuk mendapatkan pemasukan bagi organisasi keagamaan<sup>34</sup>.

Akuntabilitas bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum atau standar yang berlaku, tetapi lebih kepada tujuan organisasi dan kepercayaan publik. Pemimpin organisasi nirlaba di dorong untuk lebih memperhatikan bentuk strategi

---

<sup>32</sup> Goffman. *Presentation Of Self In Everyday Life*. New York, Doubleday Anchor Books Doubleday & Company. 1959. h. 3

<sup>33</sup> Dahnin anzar Simanjuntak. “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid.” In Simposium Nasional Akuntansi.2011 <http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5670>.

<sup>34</sup> Hasil Observasi yang dilakukan tanggal 25 september di Kopi Paste, Aceh Timur, 2020.

akuntabilitas yang dapat membantu mereka untuk mencapai misi mereka mendirikan organisasi tersebut demi menciptakan kepercayaan publik<sup>35</sup>.

Akuntabilitas pada dasarnya timbul sebagai konsekuensi atas adanya hubungan antara manajemen sebagai (*Agent*) dan pemilik sebagai (*Principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*<sup>36</sup>. Dalam penelitiannya Irvine menerangkan bahwa, bagi orang awam memandang akuntansi tidak penting karena menganggap telah menyatukan kepercayaan terhadap pengelola organisasi keagamaan bahwa mereka mencari uang untuk memajukan organisasi dan tidak akan menyalahgunakannya.<sup>37</sup> Oleh sebab itu sudah selayaknya pengurus dari organisasi membuat laporan yang baik dan dimengerti oleh semua stakeholder untuk mewujudkan akuntabilitas yang di harapkan oleh semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan di organisasi keagamaan yang di kelola oleh para pengelola pada pondok pesantren di kota aceh, serta bermanfaat sebagai bahan evaluasi pengurus serta menambah kajian akuntansi anti mainstream di organisasi keagamaan dengan metode alternative yang masih termarginalkan. Oleh karena ini peneliti tertarik untuk mengisi kekosongan dan kekurangan penelitian pada organisasi keagamaan di pesantren dengan menambahkan beberapa teori yang akan coba di ungkapkan pada penelitian ini.

Dikarenakan organisasi keagamaan masih termarginalkan maka demikian seharusnya menjadi perhatian para peneliti lain yang selalu fokus dengan organisasi atau entitas yang besar. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi unik dan sangatlah penting untuk mengungkapkan praktik akuntabilitas pada pondok pesantren di Aceh.

---

<sup>35</sup> Alnoor Ebrahim. *Accountability In Practice: Mechanism For NGOs. World Development*. Vol. 31 No.5. 2003. h.813

<sup>36</sup> Muhammad. *Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi Dan Investasi Jurnal. 2006. h.34

<sup>37</sup> Irvine, *Balancing Money And Mission In A Local Church Budget. School Of Accounting And Finance*. Australia, University Of Wollongong. 2004. h.3

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **Akuntabilitas Dalam Perspektif Pondok Pesantren (Dayah) “Studi Kasus Di Provinsi Aceh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka urgensi akuntabilitas dalam perspektif Dayah menjadi suatu keharusan, maka penelitian ini berusaha mengungkapkan:

1. Bagaimana akuntabilitas kejujuran dan hukum yang diterapkan pada Dayah?
2. Bagaimana akuntabilitas proses yang diterapkan pada Dayah?
3. Bagaimana akuntabilitas program yang diterapkan pada Dayah?
4. Bagaimana akuntabilitas kebijakan keuangan yang diterapkan pada Dayah?
5. Bagaimana akuntabilitas yang diharapkan oleh pengelola Dayah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kejujuran dan hukum yang diterapkan pada Dayah
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas proses yang diterapkan pada Dayah
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas program yang diterapkan pada Dayah
4. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kebijakan keuangan yang diterapkan pada Dayah?
5. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas yang diharapkan oleh pengelola Dayah?

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas kejujuran dan hukum yang di jalankan pada Dayah
2. Sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas proses yang dijalankan pada Dayah
3. Sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas program yang dijalankan pada Dayah
4. Sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Dayah
5. Sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas yang diharapkan oleh Dayah

#### **E. Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam perbedaan pengertian, perlu adanya penjas istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah digunakan diambil dari berbagai macam sumber dan referensi yang kredibel serta dari pakarnya, Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut<sup>38</sup>
2. Pondok pesantren, Pesantren adalah “Asrama tempat santri belajar dan tinggal”. Di luar negeri disebut dengan *boarding school*.<sup>39</sup>
3. Dayah adalah pondok pesantren dengan bahasa lain di Aceh, Dayah berasal dari bahasa Arab zawiyyah. Sejak zaman dahulu, dari jaman kerajaan Islam Samudera Pasai sampai kepada kerajaan Islam Aceh Darussalam dan sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dinamakan dengan Dayah<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta, Andi. 2002. h.97

<sup>39</sup> Siti Nursyamsiyah. *Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mua'adalah Di Era Globalisasi*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 2 No 1,2019. h 21

<sup>40</sup> Marzuki. *Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh*. Millah Vol XI, No 1, Agustus 2011. h.222